**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
ANAK DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh : Rhizkita Ramadhana

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri, S.H., M.H

Alamat : Jln.Gelugur Ujung Gg. Kandis No. 17 Pekanbaru

Email : rhizkitaa@gmail.com Telepon : 0822-8728-3592

ABSTRACT

Violence against children in Indonesian national law is a crime. Violence against children is often identified with invisible violence, such as physical and sexual violence. In fact, psychological and social (structural) violence also has a negative and permanent impact on children. In Islamic Law, physical violence against children includes the act of Jarimah (Arabic), which is an unlawful act in which the offender receives a sanction or punishment. Besides that basically all religions reject violence as a principle in carrying out an act of immoral nature that requires coercion of other parties which means violation of the principle of freedom of social interaction.

This type of research can be classified into normative juridical type of research, namely research conducted by examining literature discussion with secondary data sources consisting of primary legal material in the form of legislation, secondary legal materials, legal books, and tertiary legal materials in the form of dictionaries. Then the data were analyzed qualitatively, namely analyzing descriptive data obtained from secondary data.

From the results of the study it can be concluded that, first, if in national law the types or forms of violence are categorized into two, namely severe maltreatment and minor maltreatment. Whereas in Islamic criminal law, violence is categorized into three, namely deliberate maltreatment, semi-deliberate maltreatment, and inadvertent maltreatment. The form of sanctions that are applied in national law for acts of violence against children is regulated in Article 80-82 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection, and in Islamic criminal law sanctions are given according to the category of violence, which can be in the form of qishas, diyat punishment, or ta'zir punishment. Second, the value of regulating children in the Islamic criminal law system when compared with positive law both have many significant differences. Values that can be adopted into national law, one of which is the application of penalties / sanctions to perpetrators by applying the qishas penalty, diyat punishment, or ta'zir punishment, legal protection for victims of crime as part of protection to the public, can be realized in the form of providing compensation directly to child victims not to the State.

Keywords: Criminal Acts - Violence in Children - National Law - Islamic Criminal Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak dalam hukum positif negara Indonesia merupakan suatu tindak pidana. Menurut Barker defenisi dari kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai berulang-ulang baik secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.¹

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Efek jangka panjang paling signifikan dari kekerasan adalah bahwa siklus kekerasan akan terulang dalam generasi-generasi berikutnya. Penularan kekerasan antar generasi ini sering memanasifestasikan dirinya di kemudian hari ketika anak menjadi dewasa.²

Istilah *child abuse* atau kekerasan terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*phsycal abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*)

dari yang bermakna psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.³

Kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap kepermukaan meskipun kasusnya sering teridentifikasi.⁴ Kekerasan yang menimpa anak-anak, baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut data mengenai kekerasan anak dari tahun 2013-2017 :

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia

NO	TAHUN	JUMLAH ADUAN
1	2013	2.676 KASUS
2	2014	2.737 KASUS
3	2015	2.898 KASUS
4	2016	3.339 KASUS
5	2017	2.848 KASUS

Sumber : Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia⁵

Dalam Hukum Islam, tindak kekerasan fisik terhadap anak termasuk tindakan *jarimah* (Bahasa Arab), yaitu perbuatan yang melanggar hukum yang mana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum *qisas* pada pelaku nya. Selain itu dasarnya semua agama menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan yang bersifat amoral yang menghendaki pemaksaan terhadap

¹ Taufik Hidayat, *Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*, Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 15 Nomor 2, Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol, Padang, 2016, hlm 5.

² Ronald B. Adrine, and Alexandria M. Ruden, "Impact of domestic violence on children", Jurnal West Law, diakses melalui <https://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 10 Agustus 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

³ Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Nuansa, Bandung, 2007, hlm 48.

⁴ Sri Wahyuni, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak (Telaah Implementasinya di Kota Makassar)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, 2010, hlm. 3

⁵ <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi> – data – perlindungan-anak yang diakses pada tanggal 15 januari 2019 pukul 11.09 WIB

pihak lain yang berarti pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam berinteraksi sosial. Ada banyak macam kekerasan yang dilakukan mulai dari kekerasan fisik dan psikis tampanan, penelantaran, sampai pelecehan seksual dan lebih ekstrim lagi adalah perkosaan, pembunuhan dan eksploitasi.⁶

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Sehingga sebagai umat muslim, wajib mentaati hukum Islam sebagai pedoman dalam menjalankan sesuatu hal dalam bermasyarakat. Dalam hukum Islam juga diatur mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak sama seperti di dalam hukum positif yang berlaku pada saat ini. Pada kenyataannya, setiap tahun terjadi peningkatan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Jadi dibutuhkan adanya upaya perlindungan yang lebih untuk mengendalikan dan mengurangi tindak pidana tersebut.

Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan nilai-nilai hukum pidana Islam selain hukum positif yang berlaku saat ini. Hukum pidana Islam merupakan salah satu sistem hukum yang dapat dijadikan pedoman atau rujukan agar tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat berkurang. Karena tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam kedua sistem hukum tersebut, maka penulis akan melakukan kajian ilmiah dengan menggunakan studi perbandingan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini

dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep tindak pidana terhadap anak dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam?
2. Apa nilai-nilai pengaturan mengenai anak yang bisa di adopsi dari hukum Islam ke hukum pidana nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep tindak pidana terhadap anak dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam.
- b. Untuk mengetahui apakah nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber dalam pembentukan hukum pidana nasional.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini menjadi sumber masukan bagi instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana kekerasan fisik dan psikis terhadap anak.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong untuk rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait

⁶ Maisaroh, *Kekerasan Orangtua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 3

permasalahan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*.⁷

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.⁸

2. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Atau dengan perkataan lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya. Pengertian ini mirip dengan pengertian fikih jinayah, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas

Di sisi lain sumber hukum islam dapat pula dibedakan dalam :

- a. Sumber hukum *Ashliyah*, sumber hukum yang penggunaannya tidak tergantung pada sumber yang lain, yakni Al-Qur'an dan As-sunnah.
- b. Sumber hukum *Taba'iyah*, sumber hukum yang penggunaannya bersandarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan As-sunnah, seperti *ijma'*, *Qiyas*, *Istislah*, dan lain-lain.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁰

⁷ Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 97.

⁸ *Ibid.*

⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang, Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.14

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tinjauan> diakses pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 09.11 WIB.

2. Yuridis adalah menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹
3. Tindak Pidana adalah suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat hukum yang diatur oleh hukum.¹²
4. Kekerasan Fisik terhadap anak adalah tindakan kekerasan atau pelanggaran berupa menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan sebagainya.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, pendekatan ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

3. Teknik Pengumpulan Data

¹¹<https://study.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis-menurut> diakses pada tanggal 18 februari 2019 pukul 09.17 WIB.

¹²Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 60.

¹³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm.29.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, kamus, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan, maka penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar hukum dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang mana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku disuatu Negara dan dapat melindungi masyarakat dari suatu ancaman.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada

¹⁴ Hannah Henkel “ Let Them Frye Hearings for Determination of : Mental Disorder In Sexually Violet Person Act”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <https://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 11 Agustus 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu sesuai pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁵

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut sistem KUHP;
- b) Menurut cara merumuskannya;
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya;
- d) Berdasarkan macam perbuatannya;
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya;

4. Tujuan Hukum Pidana

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau Negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.¹⁶

5. Macam-macam Sanksi Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

6. Pertanggungjawaban Pidana

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab

- b. Kesengajaan
- c. Kealpaan
- d. Alasan penghapus pidana

B. Tinjauan Khusus Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Ter Haar yang dimaksud dengan anak adalah saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.¹⁷ Dalam pandangan hukum islam, seseorang dikategorikan memasuki usia *balig* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal seseorang mempunyai kewajiban melaksanakan syariat islam dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain mereka telah *balig* dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum islam.¹⁸

2. Hak Anak

3. Kewajiban Anak

Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya memintanya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.¹⁹

4. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Anak

¹⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm.79

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14

¹⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 1

¹⁸ *Ibid* hlm. 2

¹⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 21

- a. Asas-Asas perlindungan anak
 - 1) Pancasila
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Tujuan Perlindungan Anak
 - 1) Menjamin terpenuhinya hak-hak anak
 - 2) Mendapat perlindungan dari kekerasan
 - 3) Mendapat perlindungan dari diskriminasi
5. Bentuk Perlindungan Hukum

Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang.²⁰

Indonesia sebagai Negara yang telah mendedikasikan diri untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang bahkan diakui dalam dasar Negara, telah memberikan perlindungan khusus bagi penerus bangsa ini. Selain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara substansi sudah cukup mengakomodir hak-hak anak. Dari peraturan-peraturan yang telah dibuat ini idealnya dijadikan dasar yuridis dalam memberikan pemenuhan perlindungan terhadap anak.²¹

²⁰ T. Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Jurnal Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2011, hlm. 48

²¹ *Ibid.*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam

1. Kewajiban dan Tanggung jawab Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Nasional

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua atau wali. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nuda dan bangsa dikemudian hari.²² Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

²² Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 37

Berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum saja, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi anak sebagai korban dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya keluarga merupakan orang-orang terdekat yang sangat mempunyai andil besar dalam membantu pemulihan korban, hal ini dapat ditunjukkan dengan cara menghibur, memberikan dorongan, serta motivasi. Jadi keluarga sangat berperan penting dalam rangka membantu memulihkan kondisi kejiwaan anak sehingga anak tersebut merasa dilindungi oleh orang-orang terdekatnya.

Upaya Negara dalam memberikan perlindungan dalam bentuk perundang-undangan sebenarnya belum cukup maksimal. Meskipun sudah ada

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tetapi apa yang ada didalamnya belum dilaksanakan dengan maksimal.

Oleh karena itu, berdasarkan analisa diatas perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan yang lebih baik. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus di upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.²³ Karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memamfaatkan anak-anak sebagai tempat kejahatannya.

2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana

²³ Kenneth M. Gordon, "Rape Trauma Syndrome In Sexual Assault Cases", Jurnal West Law, diakses melalui <https://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 11 Agustus 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :²⁴
 - 1) Pasal 301
 - 2) Pasal 328
 - 3) Pasal 332
 - 4) Pasal 333
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menurut uraian diatas dan analisa penulis, berdasarkan teori tindak pidana istilah tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Secara umum undang-undang nasional tidak memberikan definisi yang memuaskan terhadap tindak pidana kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi dan perlakuan salah terhadap anak. Bahkan jenis tindak pidana tersebut tidak didefinisikan sehingga sulit untuk menakar perbuatan pidana yang ditujukan kepada anak, karena lemahnya unsur-unsur dalam rumusan delik tersebut. Pentingnya mencantumkan unsur-unsur tindak pidana pada anak adalah untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Dalam konteks hukum pidana unsur tindak pidana (*bestandelen delick*) menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan pelaku tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana pada anak. Berikut ini ditampilkan beberapa definisi dari tindak pidana tersebut dalam konteks undang-undang nasional yakni dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Model perumusan delik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan model *double track*, yaitu antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidananya dirumuskan secara terpisah. Model rumusan seperti ini ada kalanya menyulitkan penegak hukum dalam menentukan perbuatan yang dilarang dan pidananya. Model perumusan ini berbeda dengan model perumusan delik yang ada di dalam KUHP karena menggunakan model *single track* yaitu antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidananya dirumuskan dalam pasal yang sama.²⁵

3. Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Islam

- a. Pengertian dan Kedudukan Anak dalam Hukum Islam

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lila'lamin* dan

²⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 110

²⁵ Ahmad Syakirin, "Formulasi / Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Yustitia*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol.2, No.2 Desember 2018.

sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.²⁶ Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa haruslah dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Islam memerintahkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai sia-sia, Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar.²⁷

4. Perbandingan Konsep Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam

Perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam antara lain dalam tinjauan umum dari tindak pidana kekerasan terhadap anak. Didalam hukum pidana positif, tindak pidana tersebut kurang mencerminkan keadilan dan ketegasan dalam upaya penerapannya, karena masih banyak sekali terjadi kasus

kekerasan terhadap anak namun tidak dilaporkan sehingga kasus kekerasan ini terus terjadi dan berulang-ulang dan setiap tahunnya terus meningkat. Dalam hukum pidana islam sanksi utamanya adalah *qishas* yaitu balasan setimpal dengan apa yang dia perbuat kepada orang lain, pelaku dikatakan telah melakukan penganiayaan terhadap anggota tubuh, dan pelaku akan dikenakan hukuman terhadap kejahatan penganiayaan tubuh.

Jika dibandingkan dengan hukum positif dalam pengaturan atau regulasinya, sudah jelas dapat dikatakan bahwa didalam hukum positif sudah mencerminkan keadilan dan ketegasan dalam upaya penerapan hukuman tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh orang dewasa, dimana dalam sanksi utamanya akan dipenjarakan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara.²⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak akan dijatuhkan hukuman penjara. Dalam hukum Islam penjara termasuk hukuman *ta'zir*.

Hukum positif menganggap tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai urusan pribadi yang hanya berhubungan dengan individu dan tidak berhubungan dengan masyarakat. Oleh karenanya dalam hukum positif, apabila

²⁶ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008, hlm. 46.

²⁷ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 7

²⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kekerasan tersebut dilakukan dengan sengaja maka pelaku tersebut dikenakan sesuai undang-undang yang ada. Untuk itu perumusan mengenai kebijakan hukum positif mendatang adalah ditegakkannya hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan dalam undang-undang supaya pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat berkurang dan tidak terjadi lagi.

Berdasarkan analisa dari uraian diatas, tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam dirinya dan potensi yang datang dari luar dirinya, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, atau dengan ungkapan yang singkat, untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengambil segala hal yang memiliki kemaslahatan dan menolak segala hal yang merusak dalam rangka menuju keridoan Allah sesuai dengan prinsip tauhid.

Menurut pendapat dan analisa penulis, berdasarkan teori hukum pidana islam, Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan Fikih Jinayah, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil terperinci.²⁹ Jadi, secara garis

besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya.

Namun jika melihat cakupan yang lebih luas lagi, maka cakupan hukum pidana Islam pada dasarnya hampir sama dengan yang diatur di dalam hukum positif, karena selain mencakup masalah tindak pidana dan hukumannya juga disertai dengan pengaturan masalah percobaan, penyertaan, maupun gabungan tindak pidana. Berikut ini dijelaskan hal-hal yang berupa tindak pidana (*jarimah*) dan hukuman (*uqubah*) dalam hukum pidana Islam.³⁰ *Jarimah* atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.³¹

Di dalam hukum positif, apa yang dinamakan dengan menjatuhkan hukuman lebih cenderung merupakan hak para hakim untuk menentukan apakah akan dipakai batas minimal atau batas maksimal hukuman yang

²⁹ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Hukum

Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 15, No.1 Juni 2015.

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

ditetapkan undang-undang. Sedangkan di dalam hukum pidana Islam ada hukuman yang dinamakan dengan hak Allah (*had*), yang kadarnya tidak boleh dikurangi atau ditambah. Hukum pidana Islam memberikan solusi atas semua persoalan tersebut. Bentuk hukuman dalam Islam tidak memakan waktu lama sehingga tidak memakan waktu produktif si terpidana.

Hukum pidana Islam tidak mengenal biaya tinggi dan memberikan efek jera, baik bagi si terhukum maupun masyarakat. Berbeda dengan hukum positif yang merupakan ciptaan manusia dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, hukum pidana Islam sebagai hukum ciptaan Allah SWT bersifat abadi, fleksibel untuk diterapkan di segala tempat dan waktu, sesuai dengan fitrah manusia, serta sejalan dengan logika dan hati nurani manusia.

B. Nilai-Nilai Pengaturan Mengenai Anak Yang Dapat Diadopsi Dari Hukum Pidana Islam Kedalam Hukum Pidana Nasional

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, diperlakukan dengan penuh kasih sayang sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi

anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.³² Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa.³³

Sedangkan secara aspek filosofis yang terdapat dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini. Negara menjamin Anak-anak tersebut memperoleh hak pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik

³² Iman Jauhari, *Loc.cit*

³³ Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surabaya*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2017

secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.³⁴

Berbagai kekerasan, penyimpangan, dan eksploitasi terhadap anak akhir-akhir ini kian merebak sehingga sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan bagi terpenuhinya perlindungan hukum untuk anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah berlaku selama 5 tahun terakhir, tetapi kekerasan terhadap anak tidak menyurut bahkan dari data yang terpantau di Komisi Nasional Perlindungan Anak terlihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apabila dicermati, sesungguhnya anak merupakan anggota keluarga yang paling rentan, karena anak kerap menjadi korban kekerasan dari keluarga maupun lingkungannya. Keluarga memiliki potensi yang besar untuk menekan anak dalam segala hal. Anak kerap di perlakukan kasar, ditelantarkan, dan korban penyimpangan pengasuhan padahal masa depan kita terletak pada seberapa maksimal perhatian terhadap anak-anak.

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Tindak kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja secara verbal dan non verbal yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi, maupun seksual

yang melanggar Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat.

Dalam kehidupan manusia agama menjadi seperangkat pedoman hidup, yakni satu-satunya pedoman yang dapat menjelaskan keberadaan manusia kini, asal-usulnya, dan masa depannya setelah mati. Tidak ada pedoman lain dalam kebudayaan manusia yang mampu memberikan penjelasan tentang eksistensi manusia selengkap yang dilakukan agama.³⁵ Agama dan manusia tidak dapat dipisahkan, karena jika manusia tidak beragama maka akan kehilangan pedoman dalam mengontrol kehidupannya.

Dan bagi umat islam memiliki seperangkat hukum yang dikenal dengan hukum pidana islam yang mampu dinilai menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia di era globalisasi. Hukum Pidana islam dan era globalisasi sering dipersepsikan kedalam dua hal yang sangat berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. Dalam salah satu sudut pandang hukum islam merupakan sesuatu yang tidak mungkin mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu Allah SWT yang bersifat qadim. Setiap yang qadim adalah sesuatu yang bersifat statis dan tidak berubah. Sebaliknya, era globalisasi secara substansial mengalami perubahan cukup besar dan bersifat dinamis.³⁶

Berkenaan dengan hal tersebut ada dua konsep kebijakan yang perlu

³⁴ H.M. Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Pasca Konflik Di Way Panji Lampung Selatan*, Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2014, hlm. 5

³⁵ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2005, hlm.7

³⁶ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2005, hlm. 3

dikembangkan oleh pemerintah dalam pembangunan terhadap kepentingan anak. Pertama, kebijakan pembangunan yang memberikan perhatian penting terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak atau “*Child Meanstreaming Policy*”. Kedua, kebijakan pembangunan yang bersahabat dengan anak atau disebut dengan “*Child Friendly Policy*” demi keutuhan tumbuh kembang anak dalam menghadapi masa depan bangsa dan Negara. Karena apa yang dilakukan terhadap anak saat ini akan dilihat hasilnya dalam waktu 20-30 tahun yang akan datang.³⁷

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hukum nasional dan hukum pidana islam adalah jika dalam hukum nasional macam-macam atau bentuk-bentuk kekerasan dikategorikan menjadi dua, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Sedangkan dalam hukum pidana islam, kekerasan dikategorikan menjadi 3, yaitu penganiayaan dengan sengaja, penganiayaan semi sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Adapun bentuk-bentuk sanksi yg diterapkan dalam hukum nasional untuk tindak pidana kekerasan pada anak diatur dalam Pasal 80-82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan dalam hukum pidana islam sanksi yang

diberikan sesuai dengan kategori kekerasaannya, yaitu dapat berupa hukuman *qishas*, hukuman *diyat*, atau hukuman *ta'zir*.

2. Nilai-nilai mengenai pengaturan terhadap anak dalam sistem hukum pidana islam jika dibandingkan dengan hukum positif keduanya memiliki banyak perbedaan yang cukup signifikan. Nilai yang dapat di adopsi kedalam hukum nasional yaitu salah satunya penerapan hukuman/ sanksi kepada pelaku dengan menerapkan hukuman *qishas*, hukuman *diyat*, atau hukuman *ta'zir* , Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan ganti rugi secara langsung kepada korban anak bukan kepada Negara.

B. Saran

1. Upaya pencegahan untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak dimulai pada lingkup keluarga, masyarakat, dan pelayanan terpadu. Pemerintah harus lebih memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak agar terjaminnya pemenuhan hak-hak anak sebagai korban. Mengembangkan lebih baik lagi mengenai sistem informasi yang menyediakan informasi tentang perlindungan anak. Dan melakukan revitalisasi lembaga yang terkait dengan permasalahan anak.

2. Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk memasukkan nilai-nilai dari hukum islam kedalam hukum nasional agar tindak kekerasan terhadap anak setidaknya dapat berkurang karena dalam upaya

³⁷ Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, Jurnal Al-Adalah, Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Vol. 14, Nomor 2, 2017, hlm. 421

penerapan hukum positif pada saat ini masih belum dan masih memiliki kekurangan yang mengakibatkan terus bertambahnya jumlah kasus kekerasan dari tahun ketahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Barry, Zakaria Ahmad. 1977. *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud. 2007. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bandingkan dan Harris. 1983. *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah*, Bina Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Djamil, M Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi. 2016. *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.

B. Jurnal / Skripsi / Tesis

- Jauhari, Iman. 2008. Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Pustaka Bangsa, Medan.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Grafika, Yogyakarta.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sururin, “Kekerasan Pada Anak (Perspektif Psikologi)”, *Jurnal Ilmu Psikologi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Maisaroh, “Kekerasan Orangtua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2013
- William Ewald, “Comparative Jurisprudence (I) : What Was It Like To Try A Rat?”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <https://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> , pada tanggal 18 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- ##### C. Peraturan Perundang-undangan
- Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Hadist Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak